

serta terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dari waktu ke waktu.

C. Rincian Pelayanan Informasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan menerima permohonan informasi sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan informasi (hari)	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Alasan Penolakan Informasi
1	Januari					
2	Februari	1	2	1	0	0
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli	2	3	2	0	0
8	Agustus					
9	September	1	3	1	0	-
10	Oktober	4	4	4	0	-
11	November	1	3	1	0	-
12	Desember	2	2	2	0	-
	Jumlah	11		11	0	0

Tabel 2: Ringkasan Pelayanan Informasi Tahun 2025

No	Hari/ Tanggal	Pemohon	Alamat	Nomor Kontak	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi
1	Senin, 10 Feb 2025	Tb. Aji Fatulloh	Kp. Lialang Cilik Rt 04 Rw 03 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten. Kota Kota Serang, Kec. Taktakan, Kel. Lialang Provinsi Banten (42162)	085959614650	RAB, Salinan Kwitansi, Dokumentasi, nama Perusahaan, Dokumen pada kegiatan, Juklak dan Juknis Kegiatan belanja makan dan minum rapat di Dinas KETAPANG Provinsi Banten T.A 2022-2024	untuk mendapatka n informasi yang berkaitan dengan penyelenga raan negara dan badan publik
2	Selasa, 15 Jul 2025	Rizki Adzani	Perumahan Nirwana Asri Taktakan Serang. Kota Kota Serang, Kec. Taktakan, Kel. Drangong Provinsi Banten (42162)	085288668840	Kondisi ketahanan pangan di Banten dan permasalahannya jika ada	Membuat proyek penelitian yang dapat dikaitkan dengan kondisi ketahanan wilayah Banten

3	Rabu, 23 Jul 2025	Septa Pratama Suryani	Kp Kadu Jami, Desa Koranji, Kec Pulosari, Kab Pandeglang, Prov Banten. Kota Kabupaten Pandeglang, Kec. Pulosari, Kel. Koranji Provinsi Banten (42257)	083813625575	Skor pola pangan harapan konsumen dan ketersediaan tahun 2022- 2024	Outline Skripsi
4	Senin, 13 Okt 2025	Tb Aji Fatulloh	Kp.lialang Cilik Rt 04 Rw 03 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten. Kota Kota Serang, Kec. Taktakan, Kel. Lialang Provinsi Banten (42162)	085959614650	Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Tahun Anggaran 2022-2024 Kepada OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Adapun Pertanyaan yang kami minta sebagai berikut. 1. Apa jenis kontrak yang tepat	Tujuan informasi publik untuk mendapatka n informasi yang berkaitan dengan penyelenga raan negara dan badan publik. dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat

					<p>untuk pengadaan ATK dengan volume yang pasti untuk satu tahun? (Jawab: kontrak lumsun) 2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan ATK yang tepat? (Jawab: dilakukan sekaligus) 3. Apa prinsip pengadaan barang/jasa yang dilanggar jika barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi kebutuhan? (Jawab: prinsip efektivitas) 4. Siapa yang memiliki kewenangan menetapkan spesifikasi</p>	<p>mengetahui hasil dari badan publik yang telah dilaksanakan .</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>teknis, HPS, dan rancangan kontrak untuk pengadaan ATK di OPD? (Jawab: Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) 5. Apa bentuk kontrak yang tepat ketika melakukan epurchasing material konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp 650 juta? (Jawab: Surat Pesanan) 6. Dalam konteks pengelolaan persediaan ATK di OPD, bagaimana pencatatan beban dan persediaan ATK dilakukan?</p>	
5	Senin, 01 Dec 2025	Nur Amaliyah	Perum Pesona Alam Kencana	083819943852	Data rawan pangan FSVA Provinsi Banten	Skripsi

			Blok C8 No 08. Kota Kabupaten Serang, Kec. Kragilan, Kel. Pematang Provinsi Banten (42184)			
6	Jumat, 26 Sept 2025	Hasan Ashari	Jl. KH. A. Ghozali Km.4 Petir Kabupaten Serang Banten 42172	081219455163	RAB, Kontrak, BAST, Belanja Barang Untuk diserahkan ke masyarakat	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik
7	Senin, 06 Oktober 2025	Ketua Umum Perkumpulan Exs. NAPI	Jl. Djayadiningrat Kaloran Pena RT 001/RW 007 No. 38 Kel. Lontar Baru, Kec. Serang. Provinsi Banten (42115)	081382002889	Klarifikasi kejanggalan pada pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan belanja jasa pada dinas ketahanan pangan	Bentuk kontrol sosial
8	Selasa, 14 Oktober 2025	Ketua Umum Perkumpulan Exs. NAPI	Jl. Djayadiningrat Kaloran Pena RT 001/RW 007 No. 38 Kel.	081382002889	Permohonan bantuan dana	Untuk pelaksanaan event "Ketukan Damai"

			Lontar Baru, Kec. Serang. Provinsi Banten (42115)			
9	Selasa, 21 Oktober 2025	Pimpinan Media Semakin Viral (MSV) A.N. Rahmat Gunawan	Jl. Nunung Bakrie No.54 RT 002/002 Keboon Sawo Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	0817477785	Klarifikasi dan Konfirmasi Keterlibatan GPM 2025, Penyaluran Beras Biofortifikasi 2024, dan Penyediaan Karung Cadangan Pangan 2023	Untuk kepentingan pembuatan pemberitaan dan kajian lembaga koalisi
10	Selasa, 04 November 2025	Nur Amaliyah	Perum Pesona Alam Kencana Blok C8 No 08. Kota Kabupaten Serang, Kec. Kragilan, Kel. Pematang Provinsi Banten (42184	083819943852	Indeks Ketahanan Pangan Prov. Banten Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2020-2025 dan Data Daerah Rawan Pangan Prov. Banten Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2025	Skripsi
11	Senin, 22	LSM KPK	Jl. Ahmad	08175735778	Konfirmasi dan	Untuk

	Desember 2025	Nusantara a.n Aminudin	Yani No. 161 Cipete RT 04/RW 01 Sumur Pecung kota Serang Prov. Banten (42118)		Klarifikasi Kegiatan Tipe Swakelola dan Metode Pemilihan e- purchasing T.A 2025	kepentingan perolehan informasi dan perbandinga n hasil dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan
--	------------------	---------------------------	---	--	---	--

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan tidak ada sengketa informasi publik.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

A. Kendala Internal

1. Sumber Daya Manusia

Dari sisi internal, salah satu kendala utama dalam pelayanan informasi publik adalah keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik. Petugas PPID dan pengelola informasi masih harus merangkap tugas utama di unit kerja masing-masing, sehingga fokus dan waktu yang tersedia untuk pengelolaan layanan informasi belum optimal. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, klasifikasi informasi, serta mekanisme uji konsekuensi belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja. Kondisi ini berdampak pada perlunya waktu tambahan dalam proses